

**ANALISIS JARINGAN KOMUNIKASI ISU ‘REFORMASI’ DAN ‘TRANSFORMASI’
POLISI REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL X (TWITTER)**

Maylina Widya P.K¹, Irwan Dwi Arianto²

^{1,2,3}Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email Korespondensi: maylinawidya1323@gmail.com

ABSTRACT

The violent phenomenon of police officials handling the demonstrations of August 2025 led to polri reform claims on social media x, which was then revitalized by police institutions through the polri transformation narrative. The research aims to analyze the differences in communications network structures and also in the reforming and transforming containers of polri in digital political communication. Research USES the mixed analysis approach, which is a quantitative analysis based on social network analysis (sna) and qualitative analysis using foucauldian accuracy analysis (fda). Data obtained from conversations on social media x during the 25th of August, 2025 and analyzed using nodexl software. Research shows that communication networks consist of 1,179 actors, 800 connections, 238 clusters, and a density value of 0.00146 that indicates a communications network is small. The polri reform discourse developed as an advocacy-dominated communication between users through repeated, reply, and retweets to form a more participative public discussion space. Instead, polri transformation discourses are dominated by one-direction communication from institutional accounts with high levels of self-loops and thus relatively low interplay between users. Fda analysis shows that the two issues representing the containers between the people narrative and the institution narrative for establishing legitimacy. The polri reform narrative gains legitimacy through the collective experiences of people and the cases involving police, while the polri transformation narrative has not been fully accepted because it is being speculated has not reflected a real change. Research findings confirm that power in digital political communication is determined not only by the institutional authorities, but also by the legitimacy of discourses built through public participation in communication networks.

Keywords: Reformasi Polri, Transformasi Polri, Communications Network Analysis.

ABSTRAK

Fenomena kekerasan aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi Agustus 2025 memicu munculnya tuntutan Reformasi Polri di media sosial X, yang kemudian direspons oleh institusi kepolisian melalui narasi Transformasi Polri. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan struktur jaringan komunikasi serta kontestasi diskursus Reformasi dan Transformasi Polri dalam komunikasi politik digital. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu analisis kuantitatif berbasis Social Network Analysis (SNA) dan analisis kualitatif menggunakan Foucauldian Discourse Analysis (FDA). Data diperoleh dari percakapan di media sosial X selama periode 25 Agustus–25 Oktober 2025 dan dianalisis menggunakan perangkat lunak NodeXL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan komunikasi terdiri atas 1.179 aktor, 800 hubungan, 238 cluster, serta memiliki nilai densitas sebesar 0,00146 yang mengindikasikan jaringan komunikasi bersifat renggang. Diskursus Reformasi Polri berkembang sebagai komunikasi advokasi yang didominasi interaksi antarpengguna melalui mention, reply, dan retweet sehingga membentuk ruang diskusi publik yang lebih partisipatif. Sebaliknya, diskursus Transformasi Polri didominasi komunikasi satu arah dari akun institusional dengan tingkat self-loops yang tinggi sehingga interaksi antarpengguna relatif rendah. Analisis FDA menunjukkan bahwa kedua isu merepresentasikan kontestasi antara narasi masyarakat dan narasi institusi dalam membangun legitimasi. Narasi Reformasi Polri memperoleh legitimasi melalui pengalaman kolektif masyarakat dan berbagai kasus yang melibatkan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

434

Indexed

SINTA 4



kepolisian, sedangkan narasi Transformasi Polri belum sepenuhnya diterima karena dipersepsikan belum mencerminkan perubahan nyata. Temuan penelitian menegaskan bahwa kekuasaan dalam komunikasi politik digital tidak hanya ditentukan oleh otoritas institusional, tetapi juga oleh legitimasi diskursus yang dibangun melalui partisipasi publik dalam jaringan komunikasi.

Kata kunci: Reformasi Polri, Transformasi Polri, Analisis Jaringan Komunikasi.

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia merupakan instransi yang dibentuk untuk menganyomi, melayani masyarakat, menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum yang adil diatur dalam UUD 1945 pasal 30 Ayat 4 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun pasca demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar bulan Agustus tahun 2025, terjadi kerusuhan dan kerugian yang dialami dari pihak masyarakat maupun pemerintahan terutama citra instansi kepolisian karena bersinggungan langsung di tempat demonstrasi tersebut. Kepolisian menjadi sorotan atas tindakan yang menyimpang dalam menangani demonstrasi tersebut. Masyarakat dan media berita menyoroti adanya tindakan semena-mena dan oknum yang memperkeruh semasa demonstrasi, salah satunya pada 28 Agustus 2025 terjadi tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, seorang ojek online yang dilindas brimob kepolisian.

Karena tragedi tersebut, masyarakat menilai kepolisian telah mengalami malfungsi dan bersikap bias dengan bertindak semena-mena sehingga menjadi boomerang untuk kepolisian itu sendiri. Kemudian masyarakat melakukan kampanye di media sosial salah satunya yaitu X dengan *hashtag* #ReformasiPolri berupa kritikan dan tuntutan agar segera dilaksanakan agenda Reformasi Polri. Masyarakat memanfaatkan media sosial X menjadi wadah bagi pengguna mengutarakan pendapat tentang isu dan topik apapun, dari diskusi ringan sampai berat seperti isu politik. Setelah kampanye #ReformasiPolri viral di media sosial, pada tanggal 17 September 2025 kepolisian bergerak melakukan sebuah perubahan yaitu Transformasi Polri sebagai upaya perubahan dan perbaikan institusi kepolisian secara menyeluruh agar lebih responsif, profesional, dan dipercaya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Program utama yang dicetuskan oleh Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, sebagai Kapolri dalam Transformasi Polri adalah “Polisi RI Presisi” yang berarti prediktif, responsibilitas, dan transparansi keadilan dengan tujuan membangun kembali citra dan kepercayaan masyarakat (Riadi & Kurniawati, 2022).

Dari sudut pandang ilmu komunikasi, isu ini berkaitan jaringan komunikasi sehingga menciptakan opini publik di dunia digital. Dalam buku karya Borgatti, Everett, dan Johnson berjudul “*Analyzing Social Networks*” menjelaskan bahwa jaringan komunikasi tidak hanya sekumpulan individu, melainkan hubungan antar individu (aktor) yang menyebabkan pendapat seseorang dipengaruhi oleh hubungannya dengan orang lain. Dan dalam komunikasi sosial, *big data* merupakan data yang dapat diukur dan dianalisis seperti interaksi (komentar, *mention*, *like*, dan lainnya) dalam skala besar untuk melihat perubahan pola aktivitas hubungan dan peran koneksi antar kelompok dari jejak digital. Melalui analisis jaringan komunikasi dengan big data, hasil data terkait isu Reformasi dan Transformasi polisi RI dapat diolah untuk menggambarkan jaringan komunikasi melalui setiap interaksi aktor (*tweet*, *mention*, *retweet*, *like*, dan penggunaan *hashtag*).

Fenomena komunikasi tentang Reformasi dan Transformasi Polisi RI mencerminkan jaringan komunikasi di ruang digital yang terbentuk untuk membangun persepsi publik terhadap “Reformasi” dan “Transformasi” tersebut. Oleh karena itu, makalah ini akan menganalisis jaringan komunikasi berbasis *big data* terhadap transformasi dan reformasi polisi RI serta menggunakan Analisis Wacana Faucauldian sehingga dapat melihat perbedaan hubungan dari dua isu tersebut. Makalah ini bertujuan untuk memahami perbedaan sudut pandang tentang Reformasi dan Transformasi Polri melalui jaringan komunikasi berbasis big data yang terbentuk.

METODE

Penelitian *mix method* yaitu kuantitatif deskriptif-komparatif dan kualitatif bertujuan untuk mengukur, menjelaskan, dan membandingkan pola komunikasi dalam jaringan media sosial secara sistematis dan objektif dengan data numerik. Pendekatan kuantitatif membantu peneliti menganalisis struktur jaringan komunikasi dengan tiga level analisis, yaitu level struktur jaringan, kelompok, dan aktor secara terukur. Selanjutnya pendekatan kualitatif berperan dalam menjelaskan dan menganalisis makna dari temuan yang dilakukan secara kuantitatif berkaitan dengan teori yang relevan. Sifat deskriptif akan digunakan dengan tujuan menggambarkan struktur jaringan komunikasi, aktor, dan pola interaksi yang terbentuk dalam publik terkait dua isu yang diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, variabel utama dalam makalah ini ada Reformasi Polri dan Transformasi Polri yang berkembang dalam komunikasi publik di media sosial X. Objek penelitian yang digunakan berupa interaksi publik di media sosial X seperti *tweet*, *mention*, *reply*, *retweet*, dan hastag dimulai dari 25 Agustus sampai 25 Oktober 2025. Pemilihan periode tersebut karena terjadi demonstrasi di berbagai wilayah Indonesia dan muncul berbagai peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga korban jiwa sehingga memicu percakapan dan kritik publik.

PEMBAHASAN

Fenomena Isu Reformasi dan Transformasi Polri.

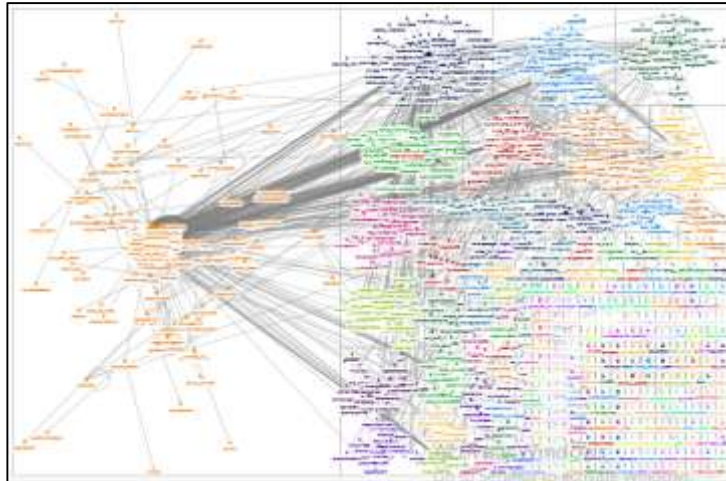
Tindakan polisi saat menangani demonstrasi Agustus tahun 2025 kemarin dinilai semena-mena, bahkan memakan korban jiwa menimbulkan kekecewaan dan membuat masyarakat serta media menyoroti tindakan polisi yang semena-mena dianggap sebagai malfungsi dari tugas dan tanggung jawab polisi sebagaimana mestinya. Masyarakat menyampaikan rasa marah dan kecewa melalui kampanye #ReformasiPolri di media sosial, salah satunya X untuk segera dilakukan Tindakan evaluasi dan perbaikan dalam institusi kepolisian. Melihat desakan Reformasi Polri semakin diperbincangkan, pada 17 September 2025 pihak kepolisian merencanakan pembentukan Transformasi Polri dengan tujuan untuk memperbaiki internal kepolisian yang lebih transparan dan profesional melalui komunikasi resmi salah satunya di media sosial X.

Kedua isu tersebut menjadi perbincangan di media sosial sehingga membentuk jaringan komunikasi Reformasi dan Transformasi Polri dalam komunikasi politik digital yaitu proses pembentukan opini politik dari kritikan maupun dukungan dalam suatu jaringan melalui media sosial seperti menggunakan hastag, *tweet*, *mention* dan lainnya. Pembahasan isu Reformasi dan Transformasi Polri memiliki perbendaan bentuk komunikasi, yaitu Reformasi Polri berupa komunikasi advokasi dengan tujuan mendorong perubahan dan menyuarakan tuntutan sedangkan Transformasi Polri berupa *counter narrative* sebagai bentuk upaya perubahan dan perbaikan institusi sudah berjalan sekaligus membangun citra positif didepan publik.

Jaringan Komunikasi Reformasi Transformasi Polri.

Jaringan komunikasi yang terbentuk pada Reformasi Transformasi Polri dari tanggal 25 Agustus sampai 25 Oktober 2025 memiliki 1179 pengguna Twitter dengan menghasilkan sebanyak 800 hubungan. Interaksi komunikasi yang terbentuk sebanyak 7, yaitu *mentions*, *tweet*, *replies to*, *mentions in reply to*, *mentions in quote*, *quote*, dan *mentions in quote reply*. Terdapat 238 grup atau disebut *cluster* yang berasal dari perkumpulan aktor-aktor membentuk suatu kelompok berdasarkan latar belakang maupun sudut pandang yang sama namun tidak jarang terisolasi dengan kelompok lain (Arianto et al., 2024). Selain itu, terdapat jumlah *self loops* sebanyak 242. *Self loops* adalah aktor yang melakukan komunikasi digital berupa *tweet* tentang suatu isu namun tidak ada interaksi maupun pertukaran diskusi dengan aktor lainnya sehingga aktor tersebut terisolasi (Alfarizy & Arianto, 2024).

Gambar 1: Visualisasi Jaringan Komunikasi Reformasi Transformasi Polri



Sumber: data peneliti menggunakan Node XL

Jaringan ini memiliki nilai densitas sebesar 0.00146589486858573 yang menunjukkan bahwa termasuk tingkatan yang rendah karena para aktor membahas topik yang sama tanpa saling terhubung maupun mengikuti. aktor-aktor yang terisolasi tanpa adanya aktor lain sebagai jembatan, bukan sebagai suatu kelompok yang kohesif secara utuh sehingga tidak ada aktor yang mendominasi opini dalam jaringan tersebut, yang disebut sebagai *self loops*. Tingkat hubungan dalam jaringan komunikasi ini rendah sehingga jaringan bersifat renggang. Terdapat top 3 dari masing-masing isu Reformasi dan Transformasi Polri berdasarkan tingkat *Betweenness Centrality* dan *Eigenvector Centrality* tertinggi. dalam Reformasi Polri terdapat @prabowo (0.581152), @msaid_didu (0.245486), dan @divhumas_polri (0.193505) sedangkan Transformasi Polri terdapat @grok (0.508696), @divhumas_polri (0.461263), dan @prabowo (0.178466).

Dalam analisis level kelompok pada jaringan komunikasi lebih berfokus ke mengidentifikasi para aktor yang berinteraksi dalam kelompok mereka sendiri untuk memahami perilaku para aktor tersebut (Carrington et al., 2005). Interaksi intens yang dilakukan oleh para aktor dalam suatu kelompok biasanya disebut *cluster* sebagai *subgraph* dalam jaringan komunikasi (Smith & Shneiderman, 2014). *Cluster 1* (G1) berisi tentang masyarakat yang menanyakan kelanjutan dari agenda Reformasi Polri kepada Presiden. *Cluster 2* (G2) berisi pendapat masyarakat yang kontra terhadap Transformasi Polri atas usulan institusi kepolisian itu sendiri sehingga menanyakan kelanjutan Reformasi Polri yang diusulkan oleh Presiden. *Cluster 3* (G3) mayoritas tentang kritikan kepada Presiden yang dianggap lemah dalam mengambil keputusan untuk Reformasi Polri dan kritikan terhadap agenda Transformasi Polri yang dianggap hanya membuang-buang waktu serta anggaran. *Cluster 4* (G4) tentang kekecewaan masyarakat terhadap Presiden setelah kepolisian memberitakan agenda Transformasi Polri. *Cluster 5* (G5) berisi kritikan terhadap Transformasi Polri dan melihatkan AI dengan *mentions* akun @grok untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disebarkan oleh @divhumas_polri.

Kontestasi Reformasi Transformasi Polri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Foucauldian Discourse Analysis (FDA) yang dikembangkan oleh Michel Foucault, untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam pembentukan realitas sosial. Analisis difokuskan pada bagaimana narasi mengenai isu Reformasi dan Transformasi Polri diproduksi di media sosial X (Twitter). Media sosial digunakan oleh para aktor sebagai ruang untuk membangun dan menyebarkan pengetahuan yang diharapkan dapat diterima oleh publik (Arianto et al., 2024). Dalam perspektif Foucault, pengetahuan yang dibentuk tidak selalu bersifat netral

karena selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat (Castells, 2009).

Pada jaringan komunikasi isu Reformasi Polri, produksi diskursus mayoritas berasal dari masyarakat yang menuntut perubahan institusional akibat kinerja kepolisian yang dinilai belum memenuhi harapan publik. Akun-akun aktivis dan kelompok kritis memanfaatkan media sosial sebagai sarana efektif untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai penyimpangan yang dilakukan aparat kepolisian, terutama setelah demonstrasi Agustus 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam jaringan Reformasi Polri didominasi oleh *mentions*, *replies*, dan diskusi aktif antarpengguna. Pola ini sejalan dengan *Homophily Theory*, yaitu kecenderungan aktor untuk berinteraksi dengan pihak lain yang memiliki pandangan dan nilai yang serupa (Sambaluk, 2022).

Berbeda dengan jaringan komunikasi isu Transformasi Polri lebih banyak diproduksi oleh akun institusi kepolisian sebagai upaya mempertahankan legitimasi melalui narasi perbaikan internal. Narasi yang dibangun umumnya berasal dari pejabat kepolisian dan media yang menyebarkan informasi mengenai program Presisi untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik. Meskipun jumlah unggahan terkait Transformasi Polri lebih banyak dibandingkan Reformasi Polri, jaringan ini didominasi oleh *self-loops*, yang menunjukkan tingginya aktivitas penyebaran informasi oleh aktor yang sama. Kondisi tersebut menggambarkan gerakan digital yang ramai secara kuantitas, tetapi relatif minim interaksi sosial antarpengguna (Luna-Amador et al., 2025). Sebaliknya, jaringan Reformasi Polri berkembang menjadi ruang diskusi publik karena para aktor aktif memberikan tanggapan, persetujuan, maupun kritik melalui reply dan retweet terhadap unggahan pengguna lain.

Dalam jaringan komunikasi, aktor yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi disebut Key Opinion Leader (KOL). Aktor ini berfungsi sebagai penghubung antaraktor dan antarkelompok dalam jaringan (Novitasari et al., 2024). Pada isu Reformasi Polri, akun @msaid_didu merupakan akun dari Muhammad Said Didu yang pernah menjabat sebagai sekretaris Kementerian BUMN menjadi salah satu aktor sentral melalui unggahannya yang mempertanyakan komitmen Presiden terhadap pembentukan tim Reformasi Polri. Muhammad Said Didu melalui *tweet*nya membangun narasi pengetahuan dengan menyangkutkan kasus-kasus yang melibatkan polisi seperti kasus narkoba dan tindakan semena-mena pasca demonstrasi pada Agustus 2025 sehingga menjadi bukti bahwa Reformasi Polri merupakan sebuah urgensi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Selain @msaid_didu, terdapat akun @suno2g merupakan akun dari Susno Duadji yaitu mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri turut serta membangun narasi terkait pentingnya Reformasi Polri dilakukan secara nyata, bukan malah membentuk tim lain untuk kasus korupsi *woosh* tanpa memberikan kejelasan terkait tim Reformasi Polri. Dari narasi pengetahuan tersebut, memicu interaksi timbal balik yang intens, yang mana banyak aktor mendukung tuntutan reformasi dengan mengaitkannya juga pada berbagai kasus melibatkan kepolisian.

Sementara pada isu Transformasi Polri, akun @divhumas_polri membangun narasi bahwa Polri sedang menjalankan reformasi kepolisian secara berkelanjutan melalui peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap evaluasi. Penggunaan istilah seperti “reformasi kepolisian yang berkelanjutan”, “terbuka untuk evaluasi”, dan “memperbaiki diri” menunjukkan upaya institusi untuk membentuk pemahaman publik bahwa transformasi internal sedang berlangsung. Melalui komunikasi resmi tersebut, @divhumas_polri memiliki kekuasaan simbolik untuk membangun legitimasi institusi. Namun, narasi tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh publik. Sebagian aktor memberikan dukungan terhadap agenda Transformasi Polri, sedangkan sebagian lainnya menunjukkan keraguan dengan menyebut akun @grok (AI) untuk memverifikasi kebenaran informasi yang disampaikan. Dalam konteks ini, @grok berfungsi sebagai sumber pengetahuan alternatif dan menjadi aktor sentral bayangan dalam jaringan komunikasi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya praktik *Networked Fact-Checking*, yaitu kolaborasi antara pengguna media sosial dan teknologi kecerdasan buatan untuk memeriksa validitas suatu informasi (Nurlatifah & Irwansyah, 2021).

Dalam diskusi tersebut, akun @prabowo dan @divhumas_polri sering disebut (*mentioned*) sebagai bentuk tuntutan publik terhadap kejelasan kebijakan dan perubahan institusional. Tingginya perhatian yang diterima kedua akun tersebut menunjukkan posisinya sebagai *attention hub*, yaitu aktor yang berada pada posisi sentral dalam jaringan dan memiliki tingkat koneksi yang tinggi (Himmelboim et al., 2024). Walaupun akun @prabowo memiliki kekuatan terkait isu Reformasi Transformasi Polri, kekuatan tersebut dianggap semu karena tidak memberikan kejelasan atau jawaban dari narasi yang dibangun oleh masyarakat. Begitu pula dengan akun @divhumas_polri, bedanya ketika kepolisian membuat narasi dengan akun resminya, tidak mendapat dukungan secara penuh karena masyarakat yang skeptis serta tidak sesuai harapan yaitu oknum-oknum kepolisian yang harus dilengserkan.

Dalam analisis Foucault, narasi yang dibangun memiliki aturan-aturan untuk membatasi apa yang dibahas dalam narasi tersebut (Kendall & Wickham, 1999). Aturan tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara narasi tersebut disampaikan dari *tweet* dan 2 kata yang sering muncul. *Tweet* yang diunggah akan dikategorikan menjadi beberapa tema untuk menggambarkan kata atau ide yang saling terikat sebagai cerminan dari hubungan tersebut (Arianto et al., 2023). Tema 1 yaitu Tuntutan dan Urgensi Reformasi Polri (reformasi, polri, komite, tim, presiden, prabowo), tema 2 yaitu Isu Transformasi Polri (listyosigitp, divhumas_polri, penegak, hukum, ganti, polri), dan tema 3 yaitu Penolakan Agenda Transformasi Polri (prabowo, divhumas_polri, gak, jadi). Tema 1 menyoroti tuntutan dari masyarakat segera dilakukan Reformasi Polri karena merupakan sebuah urgensi dengan menyantumkan bukti-bukti kasus yang melibatkan kepolisian sebagai bukti memperkuat narasi tersebut. Tema 2 menyoroti masyarakat yang menanyakan kejelasan dari Presiden pasca kepolisian membuat agenda Transformasi Polri. Tema 3 menyoroti penolakan Transformasi Polri oleh masyarakat karena tidak menjawab tuntutan yang diminta oleh masyarakat terkait Reformasi Polri. Sehingga dalam isu ini Transformasi Polri merupakan kekuasaan yang semu walaupun kepolisian telah membangun narasi pengetahuan secara resmi karena tidak mendapat mayoritas dukungan dari masyarakat dan tetap menganggap bahwa Reformasi adalah suatu kebenaran yang harus dilakukan untuk memperbaiki institusi kepolisian. Dalam fenomena ini, masyarakat memiliki kekuatan dalam menentukan kebenaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan diskursus Reformasi dan Transformasi Polri, menunjukkan bahwa terdapat kontestasi legitimasi kepolisian di ruang digital yang mana pada isu Reformasi Polri berkembang sebagai komunikasi advokasi yang berusaha membangun pemahaman perubahan institusional yang masih belum berjalan dengan menuntut perubahan melalui Reformasi Polri yang masih belum terbentuk oleh Presiden. Diskursus ini mayoritas aktornya adalah aktor non institusional yang menggunakan ruang digital membentuk persepsi masyarakat agar kritis terhadap proses Reformasi Transformasi Polri. Sedangkan pada isu Transformasi Polri sebagai *counter narrative* untuk membangun pengetahuan dengan narasi upaya yang dilakukan kepolisian dalam memperbaiki internal kepolisian dengan evaluasi, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui akun resmi @divhumas_polri sebagai solusi dari kritikan oleh masyarakat melalui akun resmi kepolisian untuk membangun pengetahuan dan kepercayaan publik. Melalui konsep dari *Foucauldian Discourse Analysis*, terdapat temuan bahwa narasi Reformasi Polri memperoleh legitimasi melalui pengalaman masyarakat dan berbagai kasus yang berkaitan dengan institusi kepolisian sebagai bukti dari narasi pengetahuan yang dibangun. Sedangkan narasi Transformasi Polri membangun legitimasi melalui komunikasi resmi terkait perbaikan internal kepolisian. Namun narasi tersebut masih mendapatkan pengakuan kebenaran dan respons skeptis dari publik karena masih dinilai belum mencerminkan realitas nyata sehingga mengidentifikasi adanya kekuatan semu (Arianto et al., 2024). Kontestasi dari kedua diskursus tersebut terdapat temuan bahwa narasi Reformasi Polri yang dibangun lebih kuat daripada Transformasi Polri karena masyarakat yang aktif melakukan interaksi dalam jaringan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam komunikasi politik digital tidak semata ditentukan oleh lembaga resmi karena media sosial menjadi wadah dalam memproduksi kebenaran.

REFERENSI

- Alfarizy, S. N., & Arianto, I. D. (2024). Analisis Jaringan Komunikasi Isu Adakami pada Platform Media Sosial Twitter (X). *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7, 6437–6446.
<http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Arianto, I. D., Ida, R., & Marijan, K. (2023). Pseudo Power Tiga Periode pada Jaringan Komunikasi Islam Tradisional dan Modern di Media Sosial Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(2), 177.
<https://doi.org/10.31315/jik.v21i2.9932>
- Arianto, I. D., Ida, R., & Marijan, K. (2024). *DISCOURSE COMMUNICATION NETWORK ANALYSIS OF “3 PERIODE” ON TWITTER SOCIAL MEDIA* (Vol. 22, Number 1). Jurnal Administrasi Publik.
- Carrington, P. J. ., Scott, John., & Wasserman, Stanley. (2005). *Models and methods in social network analysis*. Cambridge University Press.
- Castells, M. (2009). *COMMUNICATION POWER*.
- Himmelboim, I., Maslowska, E., & Araujo, T. (2024). Integrating Network Clustering Analysis and Computational Methods to Understand Communication With and About Brands: Opportunities and Challenges. *Journal of Advertising*, 53(2), 296–306.
<https://doi.org/10.1080/00913367.2023.2166629>
- Nurlatifah, M., & Irwansyah. (2021). Fact-Checking dan Jurnalisme Kolaboratif pada Platform Media Online. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 18, 67–86.
- Kendall, Gavin., & Wickham, Gary. (1999). *Using Foucault’s methods*. Sage Publications.
- Luna-Amador, J., Caraballo-Payares, A., & Escobar-Espinoza, A. (2025). Brand activism: Research trends and cluster analysis. *European Research on Management and Business Economics*, 31(2).
<https://doi.org/10.1016/j.iemeen.2025.100279>
- Novitasari, A., Sumartias, S., Rizal, E., Padjadjaran, U., Raya Bandung Sumedang, J., & Barat, J. (2024). STRUKTUR JARINGAN PENGGUNA MEDIA SOSIAL X DENGAN TAGAR NOVIRALNOJUSTICE NETWORK STRUCTURE OF X SOCIAL MEDIA USERS WITH NOVIRALNOJUSTICE HASHTAG. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 7(2), 235–250.
<https://doi.org/10.17977/um022v7i2p235-250>
- Riadi, M., & Kurniawati, D. (2022). Presisi sebagai Inovasi dan Strategi Membangun Citra Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *PERSPEKTIF*, 11(4), 1569–1581.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.8096>
- Sambaluk, N. M. (2022). *Weaponizing Cyberspace*. Praeger security international.
- Smith, M. A., & Shneiderman, B. (2014). *twitter-topic-networks-from-polarized-crowds-to-community-clusters In association with the Social Media Research Foundation*.
<http://www.pewinternet.org/2014/02/20/mapping>